



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR 32 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN
DAN AKSES ARSIP DINAMIS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip yang otentik dan terpercaya diperlukan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis yang sesuai dengan prinsip kaidah dan standar kearsipan serta merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan kearsipan nasional;
 - b. bahwa untuk penyempurnaan dan peningkatan ketertiban administrasi, serta berdasarkan hasil evaluasi klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan untuk memenuhi kebutuhan kelembagaan, beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip Dinamis sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Perubahan

atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip Dinamis;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas

- Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip Dinamis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1567);
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 32 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip Dinamis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1567) diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 5 dan angka 6 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 5a dan angka 5b, ketentuan angka 6 Pasal 1 diubah, dan di antara angka 6 dan angka 7 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 6a dan angka 6b sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Arsip Dinamis adalah, Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
3. Akses Arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.
4. Klasifikasi Arsip adalah proses identifikasi kategori-kategori kegiatan dan Arsip dinamis yang dihasilkan dan mengelompokkannya
5. Klasifikasi Keamanan Arsip yang selanjutnya disebut Klasifikasi Keamanan adalah kategori kerahasiaan informasi Arsip berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkannya terhadap kepentingan dan keamanan Negara, masyarakat dan perorangan
- 5a. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 5b. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah

pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.

6. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - 6a. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah provinsi.
 - 6b. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota.
 7. Pengamanan Arsip adalah program perlindungan fisik dan informasi arsip berdasarkan klasifikasi keamanannya.
2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Bawaslu terdiri atas:
 - a. Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis fungsi substantif; dan
 - b. Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis fungsi fasilitatif.
- (2) Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis fungsi substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis fungsi fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Penyebutan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Peraturan Badan ini termasuk Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan/atau Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Provinsi Aceh.

4. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 11A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

Pada saat Peraturan Badan ini berlaku, ketentuan mengenai unit organisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187), tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya unit organisasi berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421).

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABHAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1252

Sesuai dengan naskah aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Hukum, Humas, dan Pengawasan Internal,



Ferdinand Eskol Tiar Sirait

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BAWASLU NOMOR
32 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM KLASIFIKASI
KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

No.	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
FUNGSI SUBSTANTIF						
A	PM	Pengawasan Pemilu				
1	PM.00	Teknis Pengawasan Pemilu				
	PM.00.00	a. Pengawasan Pemilu Tingkat Pusat	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Fasilitasi Pengawasan
	PM.00.01	b. Pengawasan Pemilu Tingkat Provinsi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Fasilitasi Pengawasan

No.	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	PM.00.02	c. Pengawasan Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Fasilitas Pengawasan
2	PM.01	Hasil Pengawasan Pemilu				
	PM.01.01	a. Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Pusat	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Fasilitas Pengawasan
	PM.01.02	b. Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Provinsi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Fasilitas Pengawasan
	PM.01.03	c. Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Fasilitas Pengawasan
3	PM.02	Sosialisasi Pengawasan Pemilu				
	PM.02.00	a. Sosialisasi Pengawasan Pemilu Tingkat Pusat	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Fasilitas Pengawasan
	PM.02.01	b. Sosialisasi Pengawasan Pemilu Tingkat Provinsi	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Fasilitas Pengawasan
	PM.02.02	c. Sosialisasi Pengawasan Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Fasilitas Pengawasan
3	PM.03	Kerjasama Pengawasan Pemilu	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Fasilitas Pengawasan
4	PM.04	Partisipasi Masyarakat	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Fasilitas Pengawasan

No.	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
5	PM.05	Analisis Teknis Pengawasan Pemilu dan Potensi Pelanggaran	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Fasilitas Pengawasan
B	PP	PENANGANAN PELANGGARAN				
1	PP.00	Penanganan Temuan Pelanggaran				
	PP.00.00	a. Penanganan Tingkat Pusat				
		1. Penerimaan Penerusan Temuan Dugaan Pelanggaran	Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Fasilitas Penanganan Pelanggaran
		- Formulir Temuan				
		2. Klarifikasi	Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Fasilitas Penanganan Pelanggaran
		- Surat Undangan Klarifikasi				
		- Keterangan/Klarifikasi dibawah sumpah/janji				
		- Berita Acara Klarifikasi				
		- Daftar Hadir Klarifikasi				
		3. Kajian Penanganan Pelanggaran dan Rekomendasi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Fasilitas Penanganan Pelanggaran
		- Kajian Laporan				
		- Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik ke Komisi Pemilihan Umum				
		- Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Aparatur Sipil Negara (Formulir B.10-DD)				
		- Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu ke Komisi				

No.	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilu Kecamatan, atau Panitia Pemungutan Suara				
		- Rekomendasi Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilu ke Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia				
		4. Status Penanganan Dugaan Pelanggaran	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Fasilitas Penanganan Pelanggaran
		- Status Penanganan Dugaan Pelanggaran				
	PP.00.01	b. Penanganan Tingkat Provinsi				
		1. Penerimaan Temuan Dugaan Pelanggaran	Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Sekretariat Bawaslu Provinsi
		- Formulir Temuan				
		2. Klarifikasi	Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Sekretariat Bawaslu Provinsi
		- Surat Undangan Klarifikasi				
		- Keterangan/Klarifikasi Dibawah sumpah/janji				
		- Berita Acara Klarifikasi				
		- Daftar Hadir Klarifikasi				
		3. Kajian Penanganan Pelanggaran dan Rekomendasi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Sekretariat Bawaslu Provinsi
		- Kajian Laporan				

No.	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		- Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu				
		- Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Aparatur Sipil Negara				
		- Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu ke Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilu Kecamatan, atau Panitia Pemungutan Suara				
		- Rekomendasi Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilu ke Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia				
		4. Status Penanganan Dugaan Pelanggaran	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Sekretariat Bawaslu Provinsi
		- Status Penanganan Dugaan Pelanggaran				
	PP.00.02	c. Penanganan Tingkat Kabupaten/Kota				
		1. Penerimaan Temuan Dugaan Pelanggaran	Rahasia	Eselon III	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota
		- Formulir Temuan				
		2. Klarifikasi	Rahasia	Eselon III	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota
		- Surat Undangan Klarifikasi				

No.	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		- Keterangan/Klarifikasi Dibawah sumpah/janji				
		- Berita Acara Klarifikasi				
		- Daftar Hadir Klarifikasi				
		3. Kajian Penanganan Pelanggaran dan Rekomendasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota
		- Kajian Laporan				
		- Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu melalui Bawaslu Provinsi				
		- Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Aparatur Sipil Negara melalui Bawaslu Provinsi				
		- Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu ke Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilu Kecamatan, atau Panitia Pemungutan Suara				
		- Rekomendasi Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilu ke Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia				
		4. Status Penanganan Dugaan Pelanggaran	Biasa/Terbuka	Eselon II	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Sekretariat Bawaslu Provinsi
		- Status Penanganan Dugaan Pelanggaran				

No.	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
2	PP.01	Penanganan Laporan/Pengaduan Pelanggaran Pemilu				
	PP.01.00	a. Penanganan Tingkat Pusat				
		1. Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran	Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Fasilitas Penanganan Pelanggaran
		- Laporan Dugaan Pelanggaran				
		- Formulir Penerimaan Laporan				
		- Tanda Bukti Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran				
		2. Klarifikasi	Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Fasilitas Penanganan Pelanggaran
		- Surat Undangan Klarifikasi				
		- Keterangan/Klarifikasi Dibawah sumpah/janji				
		- Berita Acara Klarifikasi				
		- Daftar Hadir Klarifikasi				
		3 Kajian Penanganan Pelanggaran dan Rekomendasi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Fasilitas Penanganan Pelanggaran
		- Kajian Laporan				
		- Rekomendasi dugaan pelanggaran kode etik ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu				
		- Rekomendasi dugaan pelanggaran kode etik Aparatur Sipil Negara (Formulir B.10-DD)				

No.	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		- Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu ke Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilu Kecamatan, atau Panitia Pemungutan Suara				
		- Rekomendasi Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilu ke Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia				
		4. Status Penanganan Dugaan Pelanggaran	Biasa/Terbuka	Eselon II	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran
		- Status Penanganan Dugaan Pelanggaran				
		5. Penanganan Pelanggaran Administrasi Terstruktur Sistematis dan Masif di Tingkat Pusat	Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran
		6. Penerimaan Memori Keberatan dan Pemeriksaan Keberatan	Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran
		- Memori Keberatan				
		- Surat Pemberitahuan				
		- Kontra memori keberatan dari Terlapor dan/atau pihak terkait				
		- Daftar bukti				
		- Putusan pemeriksaan keberatan				
		7. Status Keberatan	Biasa/Terbuka	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran

No.	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		- Status Keberatan				
	PP.01.01	b. Penanganan Tingkat Provinsi				
		1. Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran	Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Sekretariat Bawaslu Provinsi
		- Laporan Dugaan Pelanggaran				
		- Formulir Penerimaan Laporan				
		- Tanda Bukti Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran				
		2. Klarifikasi	Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Sekretariat Bawaslu Provinsi
		- Surat Undangan Klarifikasi				
		- Keterangan/Klarifikasi Dibawah sumpah/janji				
		- Berita Acara Klarifikasi				
		- Daftar Hadir Klarifikasi				
		3. Kajian Penanganan Pelanggaran dan Rekomendasi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Sekretariat Bawaslu Provinsi
		- Kajian Laporan				
		- Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Aparatur Sipil Negara				
		- Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu ke Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilu Kecamatan, atau Panitia Pemungutan Suara				

No.	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		- Rekomendasi Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilu ke Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia				
		4. Status Penanganan Dugaan Pelanggaran	Biasa/Terbuka	Eselon II	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Sekretariat Bawaslu Provinsi
		- Status Penanganan Dugaan Pelanggaran				
		5. Penanganan Pelanggaran Administrasi Terstruktur, Sistematis, dan Masif di Tingkat Provinsi	Biasa/Terbuka	Eselon II	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Sekretariat Bawaslu Provinsi
		6. Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Terstruktur, Sistematis, dan Masif	Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Sekretariat Bawaslu Provinsi
		- Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Terstruktur, Sistematis, dan Masif				
		- Daftar alat bukti				
		- Tanda terima berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Terstruktur, Sistematis, dan Masif				
		- Surat pemberitahuan Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi tidak diregister				
		- Buku register Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Terstruktur, Sistematis, dan Masif				
		- Surat pemberitahuan dan panggilan sampai dengan pemeriksaan				
		- Notulensi sidang pemeriksaan				

No.	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		7. Pemeriksaan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Sekretariat Bawaslu Provinsi
		- Keterangan Saksi/Ahli Dibawah sumpah/janji				
		8. Pemeriksaan Putusan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Sekretariat Bawaslu Provinsi
		- Putusan Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Terstruktur Sistematis, dan Masif				
	PP.01.02	c. Penanganan Tingkat Kabupaten/Kota				
		1) Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran	Rahasia	Eselon III	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota
		- Laporan Dugaan Pelanggaran				
		- Formulir Penerimaan Laporan				
		- Tanda Bukti Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran				
		2) Klarifikasi	Rahasia	Eselon III	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota
		- Surat Undangan Klarifikasi				
		- Keterangan/Klarifikasi Dibawah sumpah/janji				
		- Berita Acara Klarifikasi				
		- Daftar Hadir Klarifikasi				

No.	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		3) Kajian Penanganan Pelanggaran dan Rekomendasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota
		- Kajian Laporan				
		- Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu melalui Bawaslu Provinsi				
		- Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Aparatur Sipil Negara melalui Bawaslu Provinsi				
		- Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu ke Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilu Kecamatan, atau Panitia Pemungutan Suara				
		- Rekomendasi Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilu ke Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia				
		4) Status Penanganan Dugaan Pelanggaran	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota
		- Status Penanganan Dugaan Pelanggaran				
		5) Penanganan Pelanggaran Administrasi Terstruktur Sistematis dan Masif di Tingkat Kabupaten/Kota	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota

No.	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		- Laporan dugaan pelanggaran administrasi Terstruktur, Sistematis, dan Masif				
		- Surat perbaikan kelengkapan administrasi laporan				
		- Tanda terima berkas laporan dugaan pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif				
		- Surat penerusan laporan dugaan pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif ke Bawaslu Provinsi				
3	PP.02	Laporan Pelanggaran Pemilu Yang Tidak Diregistrasi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Fasilitas Penanganan Pelanggaran
C	PS	PENYELESAIAN SENGKETA				
1	PS.00	Penyelesaian Sengketa Pemilu				
	PS.00.00	Penyelesaian Sengketa Pemilu Tingkat Pusat	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Fasilitas Penyelesaian Sengketa Proses
		- Permohonan Penyelesaian Sengketa pemilu				
		- Obyek sengketa, daftar bukti, bukti, surat kuasa				
		- Kelengkapan berkas permohonan				
		- Tanda terima berkas				
		- Berita Acara Registrasi Permohonan penyelesaian sengketa Pemilu				
		- Surat pemberitahuan permohonan tidak dapat diregister				

No.	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		- Surat pemberitahuan permohonan tidak dapat diterima				
		- Surat Undangan Musyawarah penyelesaian sengketa				
		- Jawaban termohon terhadap permohonan penyelesaian sengketa Pemilu				
		- Permohonan pihak terkait penyelesaian sengketa Pemilu				
		- Surat pemberitahuan permohonan sebagai pihak terkait tidak dapat diterima				
		- Berita Acara registrasi permohonan pihak terkait				
		- Jawaban/tanggapan pihak terkait terhadap permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan				
		- Berita Acara Keterangan Ahli dibawah sumpah/janji				
		- Berita Acara Saksi dibawah sumpah/janji				
		- Berita Acara Musyawarah				
		- Berita Acara Kesepakatan				
		- Putusan gugurnya penyelesaian sengketa				
		- Putusan terjadinya kesepakatan				
		- Putusan penyelesaian sengketa Pemilu				
		- Status penyelesaian sengketa Pemilu				

No.	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		- Tanda terima salinan putusan penyelesaian sengketa Pemilu				
		- Putusan acara cepat				
	PS.00.01	Penyelesaian Sengketa Pemilu Tingkat Provinsi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Sekretariat Bawaslu Provinsi
		- Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu				
		- Obyek sengketa, daftar bukti, bukti, surat kuasa				
		- Kelengkapan berkas permohonan				
		- Tanda terima berkas				
		- Berita Acara Registrasi Permohonan penyelesaian sengketa Pemilu				
		- Surat pemberitahuan permohonan tidak dapat diregister				
		- Surat pemberitahuan permohonan tidak dapat diterima				
		- Surat Undangan Musyawarah penyelesaian sengketa				
		- Jawaban termohon terhadap permohonan penyelesaian sengketa Pemilu				
		- Permohonan pihak terkait penyelesaian sengketa Pemilu				
		- Surat pemberitahuan permohonan sebagai pihak terkait tidak dapat diterima				
		- Berita Acara registrasi permohonan pihak terkait				

No.	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		- Jawaban/tanggapan pihak terkait terhadap permohonan penyelesaian sengketa Pemilu				
		- Berita Acara Keterangan Ahli dibawah sumpah/janji				
		- Berita Acara Saksi dibawah sumpah/janji				
		- Berita Acara Musyawarah				
		- Berita Acara Kesepakatan				
		- Putusan gugurnya penyelesaian sengketa				
		- Putusan terjadinya kesepakatan				
		- Putusan penyelesaian sengketa Pemilu				
		- Status penyelesaian sengketa Pemilu				
		- tanda terima salinan putusan penyelesaian sengketa Pemilu				
		- Putusan acara cepat				
	PS.00.02	Penyelesaian Sengketa Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota	Rahasia	Eselon III	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota
		- Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu				
		- Kelengkapan berkas permohonan				
		- Form tanda terima berkas				
		- Berita Acara Registrasi Permohonan				
		- Form pemberitahuan permohonan tidak dapat diregister				

No.	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		- Form pemberitahuan permohonan tidak dapat diterima				
		- Surat Undangan Musyawarah				
		- Jawaban termohon				
		- Permohonan pihak terkait				
		- Form pemberitahuan permohonan sebagai pihak terkait tidak dapat diterima				
		- Berita Acara registrasi permohonan pihak terkait				
		- Jawaban/tanggapan pihak terkait				
		- Berita Acara Keterangan Ahli dibawah sumpah/janji				
		- Berita Acara Saksi dibawah sumpah/janji				
		- Berita Acara Musyawarah				
		- Berita Acara Kesepakatan				
		- Putusan gugurnya penyelesaian sengketa				
		- Putusan terjadinya kesepakatan				
		- Putusan penyelesaian sengketa Pemilu				
		- Status penyelesaian sengketa Pemilu				
		- Tanda terima salinan putusan				
		- Putusan acara cepat				
	PS.00.03	Penyelesaian Sengketa Pemilu Tingkat Kecamatan	Rahasia	Eselon III	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota

No.	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		- Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu				
		- Kelengkapan berkas permohonan				
		- Form tanda terima berkas				
		- Berita Acara Registrasi Permohonan				
		- Form pemberitahuan permohonan tidak dapat diregister				
		- Form pemberitahuan permohonan tidak dapat diterima				
		- Surat Undangan Musyawarah				
		- Jawaban termohon				
		- Permohonan pihak terkait				
		- Form pemberitahuan permohonan sebagai pihak terkait tidak dapat diterima				
		- Berita Acara registrasi permohonan pihak terkait				
		- Jawaban/tanggapan pihak terkait				
		- Berita Acara Keterangan Ahli dibawah sumpah/janji				
		- Berita Acara Saksi dibawah sumpah/janji				
		- Berita Acara Musyawarah				
		- Berita Acara Kesepakatan				
		- Putusan gugurnya penyelesaian sengketa				
		- Putusan terjadinya kesepakatan				
		- Putusan penyelesaian sengketa Pemilu				

No.	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		- Status penyelesaian sengketa Pemilu				
		- Tanda terima salinan putusan				
		- Putusan acara cepat				
2	PS.01	Penyelesaian Sengketa Pemilihan				
	PS.01.00	Penyelesaian Sengketa Pemilihan Tingkat Pusat	Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Proses
		- Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan				
		- Kelengkapan berkas permohonan				
		- Tanda terima berkas				
		- Berita Acara Registrasi Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan				
		- Surat pemberitahuan permohonan tidak dapat diregister				
		- Surat pemberitahuan permohonan tidak dapat diterima				
		- Permohonan pihak terkait penyelesaian sengketa Pemilihan				
		- Surat pemberitahuan permohonan sebagai pihak terkait tidak dapat diterima				
		- Berita Acara Penerimaan Permohonan Pihak Terkait				
		- Surat Panggilan Mediasi Penyelesaian Sengketa Pemilihan				
		- Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu mencapai Kesepakatan				

No.	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		- Putusan terjadinya kesepakatan mediasi penyelesaian sengketa Pemilihan				
		- Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tidak Tercapai mufakat				
		- Jadwal Pelaksanaan Mediasi dan Adjudikasi				
		- Surat Panggilan Persidangan Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Pemilihan				
		- Surat Jawaban Termohon terhadap Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu				
		- Surat Panggilan pihak terkait dalam Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Pemilihan				
		- Berita Acara Keterangan Saksi dibawah sumpah/janji				
		- Berita Acara Keterangan Ahli dibawah sumpah/janji				
		- Putusan gugurnya Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan				
		- Putusan Penyelesaian Sengketa Pemililihanan				
	PS.01.01	Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tingkat Provinsi	Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Sekretariat Bawaslu Provinsi
		- Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan				
		- Kelengkapan berkas permohonan				

No.	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		- Tanda terima berkas				
		- Berita Acara Registrasi Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan				
		- Surat pemberitahuan permohonan tidak dapat diregister				
		- Surat pemberitahuan permohonan tidak dapat diterima				
		- Permohonan pihak terkait penyelesaian sengketa Pemilihan				
		- Surat pemberitahuan permohonan sebagai pihak terkait tidak dapat diterima				
		- Berita Acara Penerimaan Permohonan Pihak Terkait				
		- Surat Panggilan Mediasi Penyelesaian Sengketa Pemilihan				
		- Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu mencapai Kesepakatan				
		- Putusan terjadinya kesepakatan mediasi penyelesaian sengketa Pemilihan				
		- Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tidak Tercapai mufakat				
		- Jadwal Pelaksanaan Mediasi dan Adjudikasi				
		- Surat Panggilan Persidangan Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Pemilihan				

No.	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		- Surat Jawaban Termohon terhadap Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu				
		- Surat Panggilan pihak terkait dalam Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Pemilihan				
		- Berita Acara Keterangan Saksi dibawah sumpah/ janji				
		- Berita Acara Keterangan Ahli dibawah sumpah/janji				
		- Putusan gugurnya Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan				
		- Putusan Penyelesaian Sengketa Pemililihan				
	PS.01.02	Penyelesaian Sengketa Pemilihan Tingkat Kabupaten/Kota	Rahasia	Eselon III	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota
		- Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan				
		- Kelengkapan berkas permohonan				
		- Tanda terima berkas				
		- Berita Acara Registrasi Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan				
		- Surat pemberitahuan permohonan tidak dapat diregister				
		- Surat pemberitahuan permohonan tidak dapat diterima				
		- Permohonan pihak terkait penyelesaian sengketa Pemilihan				

No.	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		- Surat pemberitahuan permohonan sebagai pihak terkait tidak dapat diterima				
		- Berita Acara Penerimaan Permohonan Pihak Terkait				
		- Surat Panggilan Mediasi Penyelesaian Sengketa Pemilihan				
		- Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu mencapai Kesepakatan				
		- Putusan terjadinya kesepakatan mediasi penyelesaian sengketa Pemilihan				
		- Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tidak Tercapai mufakat				
		- Jadwal Pelaksanaan Mediasi dan Adjudikasi				
		- Surat Panggilan Persidangan Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Pemilihan				
		- Surat Jawaban Termohon terhadap Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu				
		- Surat Panggilan pihak terkait dalam Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Pemilihan				
		- Berita Acara Keterangan Saksi dibawah sumpah/janji				
		- Berita Acara Keterangan Ahli dibawah sumpah/janji				

No.	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		- Putusan gugurnya Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan				
		- Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilhanan				
	PS.01.03	Penyelesaian Sengketa Pemilihan Tingkat Kecamatan	Rahasia	Eselon III	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota
		- Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan				
		- Kelengkapan berkas permohonan				
		- Tanda terima berkas				
		- Berita Acara Registrasi Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan				
		- Surat pemberitahuan permohonan tidak dapat diregister				
		- Surat pemberitahuan permohonan tidak dapat diterima				
		- Permohonan pihak terkait penyelesaian sengketa Pemilihan				
		- Surat pemberitahuan permohonan sebagai pihak terkait tidak dapat diterima				
		- Berita Acara Penerimaan Permohonan Pihak Terkait				
		- Surat Panggilan Mediasi Penyelesaian Sengketa Pemilihan				
		- Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu mencapai Kesepakatan				

No.	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		- Putusan terjadinya kesepakatan mediasi penyelesaian sengketa Pemilihan				
		- Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tidak Tercapai mufakat				
		- Jadwal Pelaksanaan Mediasi dan Adjudikasi				
		- Surat Panggilan Persidangan Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Pemilihan				
		- Surat Jawaban Termohon terhadap Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu				
		- Surat Panggilan pihak terkait dalam Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Pemilihan				
		- Berita Acara Keterangan Saksi dibawah sumpah/janji				
		- Berita Acara Keterangan Ahli dibawah sumpah/janji				
		- Putusan gugurnya Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan				
		- Putusan Penyelesaian Sengketa Pemililihanan				
3	PS.02	Sosialisasi Penyelesaian Sengketa	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Proses
		- Surat Undangan Sosialisasi Penyelesaian Sengketa				

No.	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		- Laporan Laporan Sosialisasi Penyelesaian Sengketa				
4	PS.03	Pendampingan, Monitoring, dan Evaluasi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Proses
		- Laporan Pendampingan				
		- Laporan Monitoring				
		- Laporan Evaluasi				

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABHAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BAWASLU NOMOR
32 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM KLASIFIKASI
KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

No.	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
FUNGSI FASILITATIF						
A.	PR	PERENCANAAN				
1.	PR.00	Pokok-pokok kebijakan dan strategi pembangunan				
	PR.00.00	Bahan Masukan Rencana Pembangunan Jangka Panjang/master plan	Terbuka	Eselon II	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Perencanaan dan Organisasi
	PR.00.01	Bahan Masukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah	Terbuka	Eselon II	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Perencanaan

No.	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
						dan Organisasi
	PR.00.02	Rencana Strategi	Terbuka	Eselon II	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Perencanaan dan Organisasi
	PR.00.03	Hasil Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Terbuka	Eselon II	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Perencanaan dan Organisasi
2.	PR.01	Rencana Kerja Tahunan				
	PR.01.00	Usulan unit kerja beserta data pendukung	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Perencanaan dan Organisasi
	PR.01.01	Rencana Kerja Tahunan Unit Kerja	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Perencanaan dan Organisasi
	PR.01.02	Rencana Kerja Tahunan Badan Pengawas Pemilu	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Perencanaan dan Organisasi
3.	PR 02	Penetapan/Kontrak Kinerja	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Perencanaan dan Organisasi
4.	PR.03	Penyusunan Rencana Anggaran				

No.	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	PR.03.00	Rencana Strategis	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Perencanaan dan Organisasi
	PR.03.01	Rencana Kerja Tahunan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Perencanaan dan Organisasi
	PR.03.02	Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Perencanaan dan Organisasi
	PR.03.03	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Perencanaan dan Organisasi
5.	PR.04	Laporan				
	PR.04.00	Laporan Berkala	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Perencanaan dan Organisasi
		1. Laporan bulanan 2. Laporan triwulan 3. Laporan semesteran 4. Laporan tahunan unit kerja 5. Laporan tahunan Bawaslu				
	PR.04.01	Laporan Khusus	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Perencanaan dan Organisasi

No.	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	PR.04.02	<i>Progress report</i>	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Perencanaan dan Organisasi
	PR.04.03	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Perencanaan dan Organisasi
	PR.04.04	Evaluasi Program				
		Evaluasi program unit kerja	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Perencanaan dan Organisasi
		Evaluasi program Bawaslu	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Perencanaan dan Organisasi
6	PR.05	Monitoring dan Evaluasi Kinerja				
	PR.05.00	Monitoring Anggaran Unit Kerja	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Perencanaan dan Organisasi
	PR.05.01	Monitoring Anggaran Bawaslu	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Perencanaan dan Organisasi
7	PR.06	Dengar Pendapat/ <i>Hearing</i> Dewan Perwakilan Rakyat				

No.	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	PR.06.00	Bahan/Materi Pidato/Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Kabinet	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Perencanaan dan Organisasi
B.	OT	ORGANISASI DAN TATA LAKSANA				
1	OT.00	Organisasi/Struktur organisasi Bawaslu	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Perencanaan dan Organisasi
		a. Pembentukan b. Pengubahan c. Pembubaran				
	OT.05	Berkas Reformasi Birokrasi	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Perencanaan dan Organisasi
	OT.07	Evaluasi Kelembagaan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Perencanaan dan Organisasi
	OT.01	Uraian Tugas	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Perencanaan dan Organisasi
	OT.02	Analisis Jabatan dan Beban Kerja				
	OT 06	Standar Kompetensi jabatan struktural dan fungsional	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Perencanaan dan Organisasi

No.	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	OT.03	Mekanisme Kerja	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Perencanaan dan Organisasi
	OT.04	Ketatalaksanaan				Biro Perencanaan dan Organisasi
		Tata Laksana (penyusunan dan penyempurnaan)	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Perencanaan dan Organisasi
		a. Sistem dan prosedur kerja - Analisis - Evaluasi b. Standar Pelayanan/Standar Operasional Prosedur				
C.	KA	PERSURATAN DAN KEARSIPAN				
1	KA.00	Administrasi Persuratan				
		- Buku Agenda	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Perencanaan dan Organisasi
		- Lembar Pengantar/buku ekspedisi	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Perencanaan dan Organisasi
		- Formulir/Catatan Permintaan dan Layanan Penggandaan Dokumen/Arsip	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Perencanaan

No.	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
						dan Organisasi
2	KA.01	Kearsipan				
	KA.01.00	Pembinaan Kearsipan (apresiasi, penyuluhan, workshop, bimbingan teknis)	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Perencanaan dan Organisasi
	KA.01.01	Penyusunan Sistem Kearsipan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Perencanaan dan Organisasi
	KA.01.02	Pemeliharaan dan penyimpanan arsip	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Perencanaan dan Organisasi
	KA.01.03	Layanan penggunaan/peminjaman Arsip	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Perencanaan dan Organisasi
	KA.01.04	Penyusutan Arsip:				
		a. Pemindahan Arsip Inaktif	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Perencanaan dan Organisasi
		- Berita Acara Pemindahan - Daftar Arsip yang dipindahkan				
		b. Pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Perencanaan

No.	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
						dan Organisasi
		- Berita Acara Pemusnahan				
		- Daftar Arsip yang dimusnahkan				
		- Rekomendasi/pertimbangan/pemusnahan arsip dari Arsip Nasional Rrepublik Indonesia				
		- Surat Keputusan pemusnahan				
		c. Penyerahan arsip statis	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Perencanaan dan Organisasi
		- Berita Acara Serah Terima Arsip				
		- Daftar Arsip yang diserahkan				
	KA.02	Rapat kerja /rapart koordinasi/rapat teknis	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Bawaslu	Biro Perencanaan dan Organisasi
D.	KU	KEUANGAN				
1	KU.00	Pelaksanaan Anggaran				
	KU.00.00	Kebijakan Pelaksanaan Anggaran Ketentuan/Peraturan Menteri Keuangan Menyangkut Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Anggaran	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
	KU.01	Dokumen Realisasi Pendapatan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
	KU.01.03	a. Surat Setoran Pajak				

No.	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	KU.01.04 KU.01.05	b. Surat Setoran Bea dan Cukai c. Surat Setoran Bukan Pajak atau Bukti Setor Penerimaan Negara Bukan Pajak d. Bukti Setor Sisa Anggaran Lebih atau Bukti Setor Pengembalian Belanja e. Bukti Setor Bunga dan atau Jasa Giro Bank f. Laporan Realisasi Pendapatan Negara dari masing-masing Satuan Kerja g. Dokumen Penetapan Bagi Hasil Penerimaan Pajak antara Pusat dan Daerah h. Dokumen Piutang Negara i. Dokumen Pengelolaan Investasi, Penyertaan Modal Negara dan sejenisnya j. Laporan Pengelolaan Barang Milik Negara				
	KU.00	Belanja	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
	KU.00.03	a. Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa termasuk Dokumen-Dokumen Pembayarannya: 1) Barang pakai habis 2) Barang inventaris: - Barang Bergerak/Barang Inventaris - Tanah dan Bangunan 3) Jasa 4) Software Komputer Catatan: yang termasuk dokumen pengadaan barang dan jasa antara lain:				
		- Pengumuman Lelang - Dokumen Prakualifikasi				

No.	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Peninjauan Lapangan - Berita Acara Penjelasan Pekerjaan - Berita Acara Pelelangan - Usulan Calon Pemenang - Penetapan Pemenang - Surat Perintah Kerja - Kontrak/Adendum Kontrak 				
	KU.00.03	b. Dokumen Pembayaran Keuangan:				
		<ul style="list-style-type: none"> - Pengajuan Kebutuhan Penarikan Kas - Bukti-Bukti Tagihan dari Pihak Ketiga - Surat Permintaan Pembayaran - Surat Perintah Membayar - Surat Perintah Pencairan Dana 				
	KU.01.10	c. Dokumen Tata Usaha Anggaran yaitu:				
		<ul style="list-style-type: none"> - Buku Kas Umum - Buku Kas Pembantu - Buku/Kartu Pengawasan Kredit Anggaran - Rekening Koran Bank 				
	KU.00.02	d. Daftar Gaji/Tunjangan/Lembur/Honorarium				
	KU.03.00	e. Kartu Gaji				
	KU.03.03	f. Bukti Setor Iuran/Kontribusi Pemerintah RI kepada Badan/Organisasi Internasional				
		g. Dokumen Penyertaan Modal Pemerintah				
	KU.01.02	h. Dokumen Pembayaran Hutang Negara antara lain Tagihan dari Negara Kreditur, Bukti Transfer, Nota Debet dari Bank Indonesia dll				
	KU.01.06	i. Dokumen Akuntansi Keuangan:				
		<ul style="list-style-type: none"> - Berita Acara Pemeriksaan Kas - Kas/Register Penutupan Kas - Arsip Data Komputer 				

No.	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		- Berita Acara Rekonsiliasi Antara Satuan Kerja dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara				
	KU.02	j. Laporan Keuangan Tahunan terdiri dari :				
		- Laporan Realisasi Anggaran - Neraca - Laporan Arus Kas - Catatan atas Laporan Keuangan - Laporan Perubahan Ekuitas - Laporan Operasional				
		k. Berita Acara Serah Terima Bendahara				
	KU.01.00	l. Surat Keputusan Perbendaharaan				
		- Surat Keputusan Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran - Surat Keputusan Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen - Surat Keputusan Penunjukan Bendahara - Surat Keputusan Pejabat Pengadaan				
2	KU.01.08	Bantuan/Hibah/Pinjaman Luar Negeri				
		Daftar Proyek-Proyek yang akan dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri (<i>Blue Book</i>)	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
		Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (<i>Green book</i>)	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
		Dokumen <i>Memorandum of Understanding</i> , dan Dokumen Sejenisnya	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Keuangan dan

No.	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
						Barang Milik Negara
		Dokumen <i>Loan Agreement</i> Pinjaman/Hibah Luar Negeri, <i>Legal Opinion</i> , Perjanjian Penerusan Pinjaman dan Surat Menyurat dengan <i>Lender</i>	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
		Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
		Aplikasi Penarikan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri berikut lampirannya:	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Reimbursement</i> - <i>Direct Payment/Transfer Procedure</i> - <i>Special Commitment/ L/C Opening</i> - <i>Special Account/Imprest Fund</i> - Dokumen Pengesahan atas Penerimaan Hibah Luar Negeri - <i>Notice Of Disbursement</i> 				
		Otorisasi Penarikan Dana (<i>Payment Advice</i>)	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
	KU.00.03	Realisasi Pencairan Dana Pinjaman/Hibah Luar negeri, yaitu: Surat Perintah Pencairan Dana, Surat Perintah Membayar beserta lampirannya, antara lain: Surat Perintah Pencairan, Kontrak, Berita Acara, dan Data Pendukung lainnya.	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

No.	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Replenishment</i> (Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor) meliputi antara lain : <i>No Objection Letter, Project Implementation, Notification of Contract, Withdrawal Authorization, Statement of Expenditure</i>	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
		<i>Staff Appraisal Report</i>	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
		<i>Report/Laporan yang terdiri dari:</i>	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Progress Report</i> - <i>Monthly Report</i> - <i>Quarterly Report</i> - <i>Final Report/ Completion Report</i> 				
		Laporan Hutang Negara :	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
		<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Pembayaran Hutang Negara - Laporan Posisi Hutang Negara 				
		Ketentuan/Peraturan yang Menyangkut Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
3	KU.01	Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri				

No.	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	KU.01.00	Keputusan Pengguna Anggaran tentang Penetapan:	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
		<ul style="list-style-type: none"> - Kuasa Pengguna Anggaran - Kuasa Pengguna Barang/Jasa - Pejabat Pembuat Komitmen - Pejabat Pembuat Daftar Gaji - Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar - Bendahara Penerimaan/Pengeluaran - Pengelola Barang - termasuk berita acara serah terima jabatan 				
	KU.01.01	Hibah Dalam Negeri	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
		<ul style="list-style-type: none"> - Naskah Perjanjian Hibah Daerah - Nomor Registrasi Hibah Langsung - Ijin Pembukaan Rekening - Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung - Surat Pengesahan Hibah Langsung - Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung 				
4	KU.04	Sistem Akuntansi Instansi				
	KU.04.00	Manual Implementasi Sistem Akuntansi Instansi	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

No.	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	KU.04.01	Kebijakan Akuntansi	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
	KU.04.02	Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
	KU.04.03	Laporan Realisasi Semesteran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
5	KU.05	Pertanggungjawaban Keuangan Negara				
	KU.05.00	Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan	Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
	KU.05.01	Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan internal	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
	KU.05.02	Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional:	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
		<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Hasil Pemeriksaan - Memorandum Hasil Pemeriksaan - Tindak Lanjut/Tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan 				

No.	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	KU.01.07	Dokumen Penyelesaian Kerugian Negara :	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
		- Tuntutan Perbendaharaan - Tuntutan Ganti Rugi				
E	PL	PERLENGKAPAN				
1	PL.00	Analisa Kebutuhan				
		Usulan Unit/Satuan Kerja	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
		Rencana Kebutuhan Kementerian	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
2	PL.01	Tata Ruang	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
3	PL.02	Daftar Perkenalan Mampu	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
4	PL.03	Pengadaan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
		- Dokumen Pelelangan/Pengadaan Langsung/Penunjukan Langsung				

No.	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Pelaksanaan Pekerjaan - Dokumen Serah Terima Pekerjaan 				
5	PL.04	Pemanfaatan Barang				
	PL.04.00	Bantuan/Hibah	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
	PL.04.01	Tukar Menukar	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
	PL.04.02	Pinjaman	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
	PL.04.03	Sewa	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
6	PL.05	Penyimpanan dan distribusi barang	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
		<ul style="list-style-type: none"> - Surat menyurat meliputi permintaan barang, formulir permintaan, surat perintah mengeluarkan barang, pengantar/pengiriman barang/tanda terima barang - Berita Acara Serah Terima Barang - Buku persediaan barang/kartu stok barang 				

No.	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
7	PL.06	Pemeliharaan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
		Pemeliharaan/perbaikan Barang Bergerak/Barang Inventaris Kantor (meliputi Surat Permintaan pemeliharaan/perbaikan, Surat Penawaran dari Rekanan, Surat Perintah Kerja, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
8	PL.07	Inventaris Barang	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
		- Daftar Barang Ruangan - Daftar Barang Lainnya - Kartu Inventaris Barang - Daftar Opname Fisik Barang Inventaris				
9	PL.08	Penghapusan Barang				
		Penghapusan Barang Bergerak/Barang Inventaris Kantor (meliputi berkas usul penghapusan, Panitia Penghapusan s/d Berita Acara Penghapusan.	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
10	PL.09	Dokumen Aset				
	PL.09.00	Sertifikat Tanah	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
	PL.09.01	Izin Mendirikan Bangunan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Keuangan dan

No.	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
						Barang Milik Negara
	PL.09.02	Gambar/Denah bangunan/instalasi listrik, air dan gas dan <i>As Built Drawing</i>	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
	PL.09.03	Buku Pemilik Kendaraan Bermotor	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
	PL.09.04	Surat Tanda Nomor Kendaraan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
F	HK	HUKUM				
1	HK.00	Program Legislasi				
	HK.00.00	Program Legislasi Lembaga/Pemerintah	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
	HK.00.01	Rancangan Peraturan Bawaslu				
		Rancangan Peraturan Bawaslu, termasuk naskah kajian, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan.	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
2	HK.01	Produk Hukum				
	HK.01.00	Produk hukum bersifat pengaturan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

No.	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	HK.01.01	Produk hukum bersifat penetapan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
	HK.01.02	Kajian dan Analisis Hukum	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
3	HK.02	Nota Kesepahaman/ <i>Memorandum of Understanding</i> /Kontrak/Perjanjian Dalam dan Luar Negeri	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
4	HK.03	Bantuan/Konsultasi Hukum/Advokasi (Pidana/Perdata/Pengadilan Tata Usaha Negara dan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum)	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
5	HK.04	Telaah Hukum				
6	HK.05	Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan Hukum	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
7	HK.06	Dokumentasi Hukum	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
8	HK.07	Hak Atas Kekayaan Intelektual	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

No.	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
9	HK.08	Kasus Hukum	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
G	HM	HUBUNGAN MASYARAKAT				
1	HM.00	Publikasi Melalui Media Cetak (buku, buletin, jurnal, dll) maupun Elektronik	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
2	HM.01	Liputan Rapat Dengar Pendapat/Hearing Dewan Perwakilan Rakyat	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
3	HM.02	Hubungan Antar Lembaga Negara dan Badan Pemerintah/Instansi:				
	HM.02.00	Hubungan antar lembaga pemerintah	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
	HM.02.01	Hubungan dengan organisasi sosial/Lembaga Swadaya Masyarakat	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
	HM.02.02	Hubungan dengan perguruan tinggi/sekolah, termasuk magang, Pendidikan Sistem Ganda/Praktek Kerja Lapangan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

No.	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	HM.02.03	Forum kehumasan (Badan Koordinasi Kehumasan/Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia)	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
	HM.02.04	Hubungan dengan media massa	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
		1) Siaran pers/konferensi pers/ <i>press release</i>				
		2) Kunjungan wartawan/peliputan				
		3) Wawancara				
4	HM.03	Keprotokolan:				
	HM.03.00	Penyelenggaraan acara kedinasan (upacara, pelantikan, peresmian, dan jamuan termasuk acara peringatan hari-hari besar)	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
		Buku tamu	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
	HM.03.02	Agenda kegiatan Komisioner dan Sekretaris Jenderal	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
	HM.03.01	Kunjungan dalam negeri	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
		1) Kunjungan dinas Komisioner	Biasa/Terbuka	Eselon III		

No.	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		2) Kunjungan dinas pejabat lain/pegawai	Biasa/Terbuka	Eselon III		
		Kunjungan luar negeri	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
	HM.03.03	Daftar nama/alamat rumah/pejabat	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
	HM.03.04	Keamanan dan Ketertiban untuk Pimpinan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
5	HM.04	Dokumentasi/liputan kegiatan/acara kedinasan dan peristiwa-peristiwa penting yang berkaitan dengan kinerja Bawaslu, dalam berbagai media : Kertas/foto/video/rekaman suara/multi media				
	HM.04.00	Dokumentasi/liputan kegiatan pengawasan, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa Pemilu	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
	HM.04.01	Dokumentasi/liputan kegiatan lainnya	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
6	HM.05	Penghargaan/Tanda Kenang-Kenangan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	

No.	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Administrasi pemberian penghargaan/tanda kenang-kenangan				
7	HM.06	Ucapan Terima Kasih, Ucapan Selamat, Bela Sungkawa, Permohonan Maaf dari Pimpinan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
8	HM.07	Sosialisasi Humas, Hubungan Antar Lembaga, Keprotokolan Tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
9	HM.08	Pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi kelembagaan:	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
		Kliping koran	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
		Brosur/leaflet/poster/plakat	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
		Pengumuman/pemberitaan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
10	HM.09	Pameran	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

No.	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
H	KP	KEPEGAWAIAN				
1	KP.00	Formasi Pegawai				
		Usulan dari Unit Kerja	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
		Usulan Permintaan Formasi kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
		Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
		Penetapan Formasi	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
2	KP.01	Pengadaan Pegawai				
	KP.01.00	a. Proses Penerimaan Pegawai meliputi :	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
		- Pengumuman				
		- Seleksi Administrasi				
		- Pemanggilan Peserta Test				
		- Pelaksanaan Ujian Tertulis				
		- Keputusan Hasil Ujian				
		- Wawancara				
		b. Penetapan Pengumuman Kelulusan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum

No.	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		c. Berkas Lamaran yang Tidak Diterima	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
	KP.01.01	Nota Usul dan Kelengkapan Penetapan Nomor Induk Pegawai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
		Nota Usul Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil lebih 2 tahun	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
		Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil Kolektif	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
3	KP.02	Pembinaan Karir Pegawai				
		Diklat/Kursus/Tugas Belajar/Ujian Dinas/Izin Belajar Pegawai	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
		- Surat Perintah/Surat Tugas/Surat Keputusan /Surat Izin				
		- Laporan Kegiatan Pengembangan Diri				
		Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan/Sertifikat	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
	KP.02.01	SASARAN KINERJA PEGAWAI	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
		Daftar Usul Penetapan Angka Kredit	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum

No.	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	KP.07.00	Disiplin Pegawai - Daftar Hadir - Rekapitulasi Daftar Hadir	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
	KP.08.03	Berkas Hukuman Disiplin	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
		- Ringan				
		- Sedang				
		- Berat				
	KP.08.05	Penghargaan dan Tanda Jasa	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
4	KP.02	Ujian Kenaikan Pangkat/Jabatan				
	KP.02.00	Ujian Penyesuaian Ijazah	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
	KP.02.01	Ujian Dinas	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
	KP.02.02	Ujian Kompetensi	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
5	KP.04	Penyelesaian Pengelolaan Keberatan Pegawai	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
6	KP.03	Mutasi Pegawai				
	KP.03.07	Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Dipekerjakan, Mutasi Antar Unit	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum

No.	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
	KP.03.03	Mutasi Keluarga	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
		- Surat Izin Pernikahan/Perceraian				
		- Surat Penolakan Izin Pernikahan/Perceraian				
		- Surat Nikah/Cerai				
		- Akte Kelahiran Anak				
		- Surat Keterangan Meninggal Dunia				
	KP.03.00	Usul Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
7	KP.04	Usul Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Struktural/Fungsional	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
		Usul Penetapan Perubahan Data Dasar/Status/Kedudukan Hukum Pegawai	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
	KP.03.02	Peninjauan Masa Kerja	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
	KP.03.04	Berkas Baperjakat	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
8	KP.05	Pendelegasian Wewenang				
	KP.05.00	Pelaksanaan Tugas	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum

No.	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	KP.05.01	Pelaksanaan Tugas Harian	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
9	KP.07	Administrasi Pegawai				
		Surat Perintah Dinas/Surat Tugas	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
	KP.10.01	Cuti Pegawai				Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
		Cuti Sakit, Cuti Bersalin, Cuti Tahunan, Cuti alasan penting	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
		Cuti Besar	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
		Cuti Diluar Tanggungan Negara	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
	KP.07.01	Dokumentasi Identitas Pegawai	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
		- Usul Penetapan Kartu Pegawai/Kartu Pegawai Elektronik/Kartu Istri/Kartu Suami				
		- Keanggotaan Organisasi Profesi/Kedinasan				
		- Laporan Pajak Penghasilan Pribadi				
		- Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai				

No.	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Berkas Kepegawaian & Daftar Urut Kepangkatan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
9	KP.08	Pembinaan Pegawai				
	KP.08.00	Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
	KP.08.01	Satuan Kinerja Pegawai	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
	KP.08.02	Pembinaan Mental	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
	KP.08.03	Hukuman Disiplin	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
10	KP.09	Pembinaan Jabatan Fungsional				
11	KP.10	Kesejahteraan Pegawai				
	KP.10.00	- Berkas tentang Layanan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
		- Berkas tentang Layanan Asuransi Pegawai	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
	KP.10.04	- Berkas tentang Layanan Tabungan Perumahan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum

No.	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	KP.10.03	- Berkas tentang Layanan Bantuan Sosial	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
	KP.10.02	- Berkas tentang Layanan Olahraga dan Rekreasi	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
	KP.10.05	- Berkas tentang Layanan Beras/Pakaian Dinas	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
	KP.10.06	- Berkas tentang Layanan Pengurusan Jenazah	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
12	KP.11	Pemberhentian Pegawai dengan hormat, tidak dengan hormat, Tanpa Hak Pensiun	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
		Perselisihan/Sengketa Kepegawaian	Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
		Usul Pemberhentian dan Penetapan Pensiun Pegawai/Janda/Dudanya & Pegawai Negeri Sipil yang Tewas	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
13.	KP.13	Berkas Perorangan Pegawai:				Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
	KP.13.00	Berkas Perorangan Aparatur Sipil Negara:	Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
		a. Nota Penetapan Nomor Induk Pegawai dan Kelengkapannya				

No.	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		b. Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara c. Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil d. Hasil Pengujian Kesehatan e. Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil f. Surat Keputusan Peninjauan Masa Kerja g. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat h. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/Menduduki Jabatan/Surat Pernyataan Pelantikan i. Surat Keputusan Pengangkatan dalam atau Pemberhentian dari Jabatan Struktural/Fungsional j. Surat Keputusan Perpindahan Wilayah Kerja k. Surat Keputusan Perpindahan Antar Instansi l. Surat Keputusan Cuti di luar Tanggungan Negara m. Berita Acara Pemeriksaan n. Surat Keputusan Hukuman Jabatan/Hukuman Disiplin PNS o. Surat Keputusan Perbantuan/Dipekerjakan di luar Instansi Induk p. Surat Keputusan Penarikan Kembali dari Perbantuan/Dipekerjakan q. Surat Keputusan Pemberian Uang Tunggu r. Surat Keputusan Pembebasan dari Jabatan Organik				

No.	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		s. Surat Keputusan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil t. Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil u. Surat Keputusan Pemberhentian Sementara v. Surat Keterangan Pernyataan Hilang w. Surat Keterangan Kembalinya Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan Hilang x. Surat Keputusan Pengangkatan/Pemberhentian sebagai Pejabat Negara y. Surat Keputusan Penggantian Nama z. Surat Perbaikan Tanggal Tahun Kelahiran aa. Akta Nikah/Cerai bb. Akta Kelahiran cc. Isian Formulir Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil dd. Berita Acara Pengambilan sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil dan Jabatan ee. Surat Permohonan Menjadi Anggota Parpol ff. Surat Keterangan Mutasi Keluarga gg. Surat Keterangan Meninggal Dunia hh. Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan ii. Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional jj. Surat Keterangan Hasil Penelitian Khusus kk. Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala ll. Surat Tugas/Izin Belajar Dalam/Luar Negeri mm. Surat Izin Bepergian ke Luar Negeri nn. Kartu Pendaftaran Ulang Pegawai Negeri Sipil oo. Ijazah/Sertifikat				

No.	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		pp. Surat Keputusan Penempatan/Penarikan Pegawai qq. Surat Keputusan Pengangkatan pada Jabatan di luar Instansi Induk rr. Surat Pertimbangan Status Pegawai Negeri Sipil ss. Surat Keputusan Pengaktifan Kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil tt. Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Jabatan Organik karena dicalonkan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah uu. Surat Keputusan Pensiun				
	KP.13.01	Berkas Perseorangan non Aparatur Sipil Negara	Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
	KP.13.02	Berkas Perseorangan Anggota Bawaslu				
		Bawaslu	Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
		- Ketua dan Anggota Bawaslu				
		- Ketua dan Anggota Penggantian Antar Waktu Bawaslu				
	KP.13.03	Bawaslu Provinsi	Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
		- Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi				
		- Ketua dan Anggota Penggantian Antar Waktu Bawaslu Provinsi				

No.	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	KP.13.04	Bawaslu Kabupaten/Kota	Rahasia	Eselon III	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
		- Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota				
		- Ketua dan Anggota Penggantian Antar Waktu Bawaslu Kabupaten/Kota				
	KP.13.05	Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan	Rahasia	Eselon III	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
		- Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan				
		- Ketua dan Anggota Penggantian Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan				
	KP.13.06	Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa	Rahasia	Eselon III	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
		- Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa				
		- Anggota Penggantian Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa				
	KP.13.07	Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri	Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
		- Anggota Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri				
		- Anggota Penggantian Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri				
13	KP.12	Organisasi Non Kedinasan				
I	RT	KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN				

No.	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	RT.01.02	Telekomunikasi	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
2	RT.00	Perjalanan Dinas				
	RT.00.00	Dalam negeri	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
	RT.00.01	Luar negeri	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
3	RT.01	Administrasi penggunaan fasilitas kantor meliputi permintaan dan penggunaan :				
	RT.01.01	Ruang dan gedung	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
	RT.01.00	Kendaraan operasional	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
	RT.01.03	Fasilitas dinas pejabat negara	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
	RT.01.04	Fasilitas kantor lainnya	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
4	RT.02	Risalah/Notulen Rapat:				
		Rapat Pimpinan/Pleno	Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum

No.	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Rapat Internal/Rapat Rutin/Berkala (termasuk bahan-bahan rapat)	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
	RT.01.01	Administrasi Penyediaan Konsumsi dan Akomodasi Pimpinan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
	RT.01.00	Pengurusan Kendaraan Dinas Jabatan:				
		Pengurusan surat-surat kendaraan dinas	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
		Pemeliharaan dan perbaikan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
		Pengurusan kehilangan dan masalah kendaraan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
5	RT.04	Pemeliharaan Gedung dan Taman:				
		Pertamanan/ <i>landscaping</i>	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
		Penghijauan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
		Perbaikan gedung	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
		Kebersihan gedung dan taman	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum

No.	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
6	RT.05	Pengelolaan Jaringan Listrik, Air, Telpon, dan Komputer:				
		Perbaikan/pemeliharaan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
		Pemasangan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
7	RT.03	Ketertiban dan Keamanan				
	RT.03.00	Pengamanan, penjagaan dan pengawalan terhadap kantor	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
		1) Daftar nama satuan pengamanan 2) Daftar jaga/daftar piket 3) Catatan gangguan/pelanggaran/kejadian 4) Surat ijin keluar masuk orang atau barang				
	RT.03.01	Laporan ketertiban dan keamanan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
		1) Kehilangan 2) Kerusakan 3) Kecelakaan 4) Gangguan				
8	RT.06	Administrasi Pakaian Dinas Pegawai, Satpam, Petugas Kebersihan dan Pegawai lainnya.	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
J.	PW	PENGAWASAN				
1	PW.00	Rencana Kinerja Tahunan Pengawasan Internal				

No.	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Rencana Kerja Tahunan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Inspektorat Utama
2	PW.01	Pelaksanaan Pengawasan Internal				
		Laporan Hasil Audit, Laporan Hasil Evaluasi, Laporan Akuntan, Laporan Auditor Independen yang memerlukan tindak lanjut	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Inspektorat Utama
		Laporan Hasil Audit Investigasi yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi dan memerlukan tindak lanjut	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Inspektorat Utama
		Laporan Hasil Audit, Laporan Hasil Evaluasi, Laporan Akuntan, Laporan Auditor Independen yang tidak memerlukan tindak lanjut	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Inspektorat Utama
		Laporan Hasil Audit Investigasi yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi dan tidak memerlukan tindak lanjut	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Inspektorat Utama
	PW.04	Laporan perkembangan, penanganan surat pengaduan masyarakat	Rahasia	Eselon III	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Inspektorat Utama
		Laporan pemuktakiran data tindak lanjut temuan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Inspektorat Utama
		Laporan perkembangan Barang Milik Negara	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Inspektorat Utama
	PW.02	Laporan kegiatan pendampingan penyusunan laporan keuangan dan review keuangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Inspektorat Utama

No.	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	PW.06	<i>Good Corporate Governance</i>	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Inspektorat Utama
		Pelaksanaan Pemeriksaan				
		Laporan Hasil Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional yang memerlukan tindak lanjut	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Inspektorat Utama
		Laporan Hasil Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional yang tidak memerlukan tindak lanjut	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Inspektorat Utama
3	PW.02	Reviu Keuangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Inspektorat Utama
		- Laporan dan Kertas Kerja Reviu Keuangan				
4	PW.03	Pengendalian Kinerja	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Inspektorat Utama
		- Laporan Kinerja dilingkungan Bawaslu				
		- kertas kerja laporan hasil kinerja Bawaslu				
5	PW.05	Pelaksanaan Asistensi dan Konsultasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Inspektorat Utama
		- Laporan dan Kertas Kerja Asistensi dan Konsultasi				
6	PW.08	Pemantauan				
		Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan/Program	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Inspektorat Utama

No.	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Tuntutan Ganti Rugi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Inspektorat Utama
		Pemantauan tindak laporan hasil pengawasan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Inspektorat Utama
		Penerapan <i>Early Warning System</i>	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Inspektorat Utama
		Pemantauan disiplin pegawai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Inspektorat Utama
7	PW.04	Pengaduan masyarakat	Rahasia	Eselon III	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Inspektorat Utama
8	PW.09	Pengawasan lainnya	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Inspektorat Utama
K	TI	TEKNOLOGI DAN SISTEM INFORMASI				
1	TI.00	Rencana Strategis/Master Plan Pembangunan Sistem Informasi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Pusat Data dan Informasi
2	TI.01	Dokumen Arsitektur:				
	TI.01.00	Sistem Informasi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Pusat Data dan Informasi
	TI.01.01	Sistem Aplikasi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Pusat Data dan Informasi

No.	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	TI.01.02	Infrastruktur	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Pusat Data dan Informasi
3	TI.02	Dokumentasi Implementasi:				
	TI.02.00	Sistem Informasi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Pusat Data dan Informasi
	TI.02.01	Sistem Aplikasi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Pusat Data dan Informasi
	TI.02.02	Infrastruktur	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Pusat Data dan Informasi
4	TI.03	Perekaman dan Pemutakhiran Data:	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Pusat Data dan Informasi
		- Formulir Isian				
		- Daftar Petugas Perekaman				
		- Jadwal Pelaksanaan				
		- Laporan hasil perekaman dan pemutakhiran data				
5	TI.04	Migrasi Sistem Aplikasi dan Data:	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Pusat Data dan Informasi
		- Perencanaan Migrasi				
		- Pelaksanaan Migrasi				
		- Berita Acara Kegiatan Migrasi				
		- Daftar sistem aplikasi dan data yang imigrasi				
		- Laporan hasil migrasi				

No.	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
6	TI.05	Dokumen <i>Hosting</i> :	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Pusat Data dan Informasi
		- Formulir permintaan hosting				
		- Laporan hasil uji kelayakan				
		- Laporan pelaksanaan hosting				
7	TI.06	Layanan <i>Back-up</i> Data Digital	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu	Pusat Data dan Informasi

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABHAN